

KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

FIELD PERFORMANCE FAMILY PLANNING OFFICER

Dicky Yusuf¹, Rajindra², Haris Abd Kadir³, Marwana⁴, Mutmainnah⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu

Email: dickyyusuf@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan KB dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang kondisi empirik yang ada di lapangan. Penelitian ini menentukan obyek Tentang Kinerja Petugas Lapangan KB, PPKBD dan SUB PPKBD. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang representatif. Responden penelitian ini adalah Masyarakat PUS, Tokoh Agama, Aparat Desa di Wilayah Penelitian. Populasi penelitian ini adalah masyarakat PUS di Kabupaten Donggala yang tersebar diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Donggala. Penentuan besaran sampel berdasarkan karakteristik Kecamatan, maka diperoleh sampel Kecamatan sebesar 10 Kecamatan. Setiap Kecamatan diambil 30 sampel minimal dari masyarakat PUS, aparat Desa dan tokoh agama masing-masing 2 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh Lapangan KB dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB sudah tergolong baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PPKBD dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB juga tergolong baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SUB PPKBD dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB juga termasuk kategori baik.

Kata Kunci : Kinerja Petugas, Keluarga Berencana

ABSTRACT

One effort to realize a quality family is through family planning program (KB). The purpose of this study to determine the factors that affect the performance of Field Officers KB in implementing KB extension tasks. The research used is descriptive research which is used to give deep picture about the empirical condition in the field. This study determines the object of Performance of Field Officer of KB, PPKBD and SUB PPKBD. Data collection was done through questionnaires distributed to representative respondents. The respondents of this research are EUS Community, Religion Leader, Village Apparatus in Research Area. The population of this study is the EFA community in Donggala District spread throughout the District within Donggala District. Determination of the size of the sample based on the characteristics of the District, then obtained a sample of District by 10 Districts. Each of the sub-districts was drawn by 30 minimal samples from the EFA community, village officials and religious leaders of each sample. The results showed that factors affecting the performance of family planning instructors in carrying out extension work were good. Factors that affect the performance of PPKBD in carrying out extension KB tasks are also quite good. Factors affecting the performance of SUB PPKBD in carrying out extension KB tasks are also included good category.

Keywords : Performance Officer, Family Planning

Sekretariat

Editorial: Kampus Fekon UNISMUH PALU - Palu 94118,

Sulawesi Tengah, Indonesia

Telp/HP: +6281245936241, Fax (0451) 425627

E-mail: jsm.fe.umpalu@gmail.com

OJS: <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM>

Article History:

⇒ Received 9 Januari 2018

⇒ Revised 24 Februari 2018

⇒ Accepted 28 Februari 2018

PENDAHULUAN

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat. Pembangunan ini perlu diprioritaskan dengan pertimbangan rasional bahwa keluarga merupakan unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang menjadi landasan dasar pengembangan suatu masyarakat yang unggul. Keluarga juga mempunyai sejumlah peran strategis yang tidak dapat digantikan oleh peran sebuah lembaga. Terbentuknya keluarga berkualitas akan melahirkan masyarakat dan bangsa yang sejahtera dan berkualitas.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang dalam Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa "Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas."

Visi Program KB Nasional saat ini adalah terwujudnya "Keluarga Berkualitas 2015." Adapun misinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Program KB Nasional tahun 2005-2009 adalah: "Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB" (BKKBN, 2006a).

Sejumlah pembuktian empirik menunjukkan manfaat pelaksanaan program KB. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bila perempuan bisa mengatur kehamilannya, angka kematian ibu akan berkurang hingga sepertiganya. Ibu berkesempatan mengembangkan potensi dirinya dan anak yang dilahirkan menjadi lebih sehat dan cerdas karena perhatian dan nutrisinya cukup (BKKBN online, 19 April 2009). Program KB berkontribusi meningkatkan gizi ibu dan anak, mutu tenaga kerja, produktivitas, partisipasi sekolah, tingkat

pendidikan tinggi dan tabungan pribadi. Program KB menu-runkan konsumsi, biaya kesehatan reproduksi dan juga biaya pendidikan. Program KB juga berperan dalam mengatasi perangkap kemiskinan (poverty trap) (Sugiri Syarief, 19 Juni 2009).

Jika pelaksanaan program keluarga berencana (KB) tidak berhasil, akan mengakibatkan ledakan jumlah penduduk yang akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti keterbatasan lapangan kerja, kemiskinan, keterbatasan pangan dan meningkatnya pengangguran (BKKBN online, 27 Februari 2010). Selain untuk kesehatan ibu, anak dan kesejahteraan keluarga, KB juga dapat menciptakan kondisi positif bagi pembangunan Nasional dan Daerah. Pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi secara mikro tidak akan berjalan jika tidak didukung SDM yang memadai.

Sebaliknya, pembangunan kualitas SDM tidak akan tercapai tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi secara memadai. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali (Progresif Jaya, 11 Maret 2007). Sebuah kajian yang dilakukan oleh Saleh (2005).

Perkembangan penduduk yang tidak terkendali juga dapat memunculkan permasalahan lingkungan hidup yang sehat. Di satu sisi pertambahan penduduk dunia terus terjadi, di sisi lain adanya keterbatasan sumberdaya tanah, air, hutan dan perikanan (Population Matters, 2000). Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk juga meningkatkan produksi timbunan sampah yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar. Kasus puluhan orang meninggal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah Bandung adalah salah satu buktinya. Kondisi ini tidak saja dapat terjadi di Kota-Kota besar, melainkan juga Kota-Kota sedang dan bahkan Kota kecil (Harian Pikiran Rakyat, 03 Agustus 2009).

Kondisi ini menunjukkan bahwa program KB bukan hanya berperan dalam mengurangi kemiskinan tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Kajian Ascobat Gani di DKI Jakarta menunjukkan bahwa selama tahun 1990-2000, program KB telah berhasil mencegah kelahiran penduduk sebanyak 1.818.270 jiwa. Dari hal ini, Pemerintah DKI

dapat menghemat Rp2,59 triliun untuk biaya pendidikan dasar dan Rp3,3 triliun untuk biaya kesehatan dasar (Kesrepro.info, 30 September 2007).

Jika jumlah penduduk dapat direduksi dan dikendalikan akan berdampak positif bagi dunia sebagaimana yang diharapkan dari kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Sekjen PBB Khofi Anan (2002) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dan kelaparan, tidak dapat dicapai jika masalah kependudukan dan kesehatan reproduksi tidak ditangani secara baik. Ini berarti diperlukan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan hak azasi perempuan, investasi pendidikan, investasi kesehatan dan KB.

Manfaat yang multi dimensi tentang pentingnya mereduksi dan mengendalikan penduduk, maka seharusnya program KB menjadi prioritas Pemerintah. Seiring dengan diterapkannya otonomi Daerah, program KB mengalami pergeseran paradigma. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, program KB tidak lagi dilaksanakan sentralistik di bawah koordinasi BKKBN, melainkan didesentralisasikan atau diserahkan kepada Daerah. Jadi, Kabupaten/Kota memiliki kemandirian dalam menangani masalah KB, termasuk urusan anggaran dan personilnya.

Pada awal pelaksanaan desentralisasi tahun 2004, sebagian besar Kabupaten/Kota menunjukkan komitmen yang rendah. Hal ini tampak dari bentuk kelembagaannya yang digabung dengan badan/dinas/kantor yang dianggap sejenis. Bentuk kelembagaan dari 331 Kabupaten/Kota yang sudah dituangkan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) dan 81 Kabupaten/Kota dalam bentuk SK Bupati/Walikota adalah sebagai berikut: (1) Dinas utuh sebanyak 31 Kabupaten/Kota, (2) Dinas merger sebanyak 151 Kabupaten/ Kota), (3) Dinas insert (yang diintegrasikan ke Dinas lain) sebanyak 8 Kabupaten/Kota, (4) Badan utuh sebanyak 52 Kabupaten/Kota, (5) Badan merger sebanyak 91 Kabupaten/Kota dan (6) Kantor utuh sebanyak 46 Kabupaten/ Kota.

Kondisi lain yang terjadi di era desentralisasi KB adalah berkurangnya banyak

penyuluh KB, baik karena beralih tugas menjadi pejabat struktural di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan, menjadi tenaga administrasi maupun karena pensiun. Menurut Kepala BKKBN, saat ini jumlah petugas lapangan KB sekitar 24.500 orang pada skala Nasional. Padahal idealnya, setiap Desa mempunyai dua petugas lapangan KB (Antara News, 29 Januari 2010).

Berbagai kondisi di atas menyebabkan terbengkalainya aktivitas penyuluhan KB yang merupakan ujung tombak keberhasilan KB terutama di Wilayah Pedesaan. Dampaknya adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan pesat. Tahun 2006 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,6 persen per tahun. Hal ini dinilai sangat mengkhawatirkan, karena berarti setiap tahun terdapat kelahiran 3-4 juta bayi.

Kepala BKKBN memperkirakan tahun 2008-2014 akan terjadi ledakan kelahiran bayi (baby boom) tahap kedua, setelah yang pertama terjadi tahun 1970-an. Penyebab hal ini terjadi karena saat ini kondisi keluarga Indonesia sedang mengalami masa produktif yang ditandai dengan meledaknya kaum usia muda (20-30 tahun), dapat diprediksi angka kelahiran juga akan meledak (BKKBN online, 29 Agustus 2008).

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237.556.363 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun (Wikipedia, 3 Desember 2010). Jumlah ini bertambah 32,5 jiwa sejak tahun 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya bertambah 270.833 jiwa, setiap harinya bertambah sebesar 9.027 jiwa, setiap jam bertambah 377 jiwa dan setiap detik bertambah 1,04 (1-2 jiwa) (Burton, 17 Agustus 2010).

Sebagian besar dari keluarga yang memiliki anak banyak adalah mereka yang kurang mampu dan tinggal di wilayah pedesaan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan usia produktif (Total Fertility Rate/TFR) turun menjadi 2,6, namun TFR di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yakni 2,8 berbanding 2,3 (BPS et al., 2008).

Pemantauan Peserta KB Aktif Melalui Mini Survei di Indonesia Tahun 2004 (BKKBN – Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi, 2004) menunjukkan bahwa pemakaian alat/cara KB lebih banyak dijumpai pada wanita dengan tahapan keluarga KS 2 ke atas daripada wanita dari keluarga miskin (Pra KS dan KS 1). Hasil SDKI tahun 2007 juga menyatakan bahwa 50,4 persen kalangan suami masih menginginkan mempunyai lebih dari dua anak. Adapun pada pasangan yang memiliki tiga anak hidup, hanya 78,9 persen laki-laki (suami) yang menyatakan tidak ingin menambah anak lagi (BKKBN online, 30 Maret 2009).

Berbagai kondisi di atas terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan PUS tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR). Menurut Kepala BKKBN, 70 persen pasangan keluarga muda usia di atas 20 tahun tidak mengenal KB (BKKBN online, 9 November 2010). Beberapa penelitian (antara lain Utsman, 2002; Triyono dan Uminastiti, 2002; Siti Amanah et al., 2009) memperkuat hal ini.

Terbengkalainya penyuluhan KB ikut berdampak pada masih tingginya AKB dan AKI. Menurut Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, rata-rata AKB pada periode 2003-2007 relatif stagnan di kisaran 34 per 1.000 kelahiran, padahal target MDGs pada tahun 2015 adalah 19 per 1.000 kelahiran (Ibubayi.com, 21 April 2010). Untuk AKI, tahun 2007 angkanya masih 228/100.000 kelahiran hidup, padahal targetnya adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K, 26 Maret 2010).

Semakin banyak anak terutama di kalangan keluarga miskin akan menurunkan kualitas keluarga dan pada akhirnya menurunkan kualitas masyarakat dan bangsa Indonesia secara umum. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index/HDI Report 2006), menurut Kepala BKKBN (2007), Indonesia hanya menempati urutan ke-108 dari 177 Negara yang dikaji. Berbagai kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan sebuah “generasi yang hilang” (lost of generations), yakni sebuah generasi yang tidak mampu berkontribusi dan beradaptasi

dengan jaman, yang terjadi justru hanya menjadi beban bagi bangsa dan negaranya.

Pelaksana penyuluhan dan pelayanan KB (non-medis) adalah para Penyuluh KB (PKB). Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus tenaga fungsional yang bertugas membina satu atau lebih Desa. Sekarang ini, tidak sedikit dari mereka yang bertambah jumlah Desa binaannya disebabkan berkurangnya jumlah PKB akibat pindah ke jalur struktural maupun pensiun.

Dalam menjalankan tugas, mereka biasanya dibantu secara sukarela oleh para Kader KB yang merupakan penduduk setempat. Dengan kedekatan tempat tinggal ini, diharapkan Kader lebih mampu memotivasi, memberikan spirit dan menggerakkan PUS agar secara sadar mau dan mampu menerapkan perilaku ber-KB. Untuk lebih mempercepat proses perubahan perilaku ini, diharapkan partisipasi para kader dengan memberikan contoh/teladan kepada PUS yang lain. Di sisi lain, dengan sifat pekerjaannya yang sukarela, mereka rentan untuk meninggalkan pekerjaannya. Untuk itulah, PKB dituntut mampu membina dan memotivasi serta mengapresiasi mereka agar tidak meninggalkan pekerjaannya dan tetap memiliki kinerja yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang kondisi empirik yang ada di lapangan. Penelitian ini menentukan obyek Tentang Kinerja Petugas Lapangan KB, PPKBD dan SUB PPKBD. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang representatif. Responden penelitian ini adalah Masyarakat PUS, Tokoh Agama, Aparat Desa di Wilayah Penelitian. Populasi penelitian ini adalah masyarakat PUS di Kabupaten Donggala yang tersebar diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Donggala. Penentuan besaran sampel berdasarkan karakteristik Kecamatan, maka diperoleh sampel Kecamatan sebesar 10 Kecamatan. Setiap Kecamatan diambil 30 sampel minimal dari masyarakat PUS, aparat Desa dan tokoh agama masing-masing 2 sampel.

HASIL

PLKB dapat dikatakan berperan dalam menurunkan tingkat kelahiran, terutama di kalangan keluarga miskin

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan akan berdampak pada pembangunan suatu Daerah. Jumlah tingkat kelahiran yang tinggi, senantiasa tidak dibarengi juga dengan kualitas hidup yang layak di masyarakat, sehingga menimbulkan banyak masalah utamanya masalah ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir persoalan pertumbuhan penduduk. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Donggala sebagai instansi pemerintah Daerah berkewajiban dan memiliki tanggungjawab dalam menurunkan tingkat kelahiran terutama di kalangan keluarga miskin di wilayah Kabupaten Donggala. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai lokomotif ditengah masyarakat memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas tersebut.

Berdasarkan informasi responden aparat Desa di wilayah sampel menunjukkan bahwa terdapat 85 persen aparat Desa mempersepsikan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dapat berperan dalam menurunkan tingkat kelahiran, terutama di kalangan keluarga miskin, namun masih terdapat 15 persen atau 3 aparat Desa yang mempersepsikan PLKB tidak dapat berperan dalam menurunkan tingkat kelahiran, terutama bagi kalangan keluarga miskin. Kondisi ini mengindikasikan peran PLKB dalam menurunkan tingkat kelahiran, utamanya bagi masyarakat miskin cukup baik, dalam memberikan pemahaman mengenai Program KB, namun upaya itu harus senantiasa terus ditingkatkan secara maksimal sehingga tingkat pertumbuhan penduduk terutama menekan tingkat kelahiran masyarakat miskin dapat terwujud. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik dibawah ini :



PLKB dapat dikatakan ikut berperan mensejahterakan keluarga, terutama Gakin

Upaya untuk terus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Donggala terus digalakkan oleh pemerintah Daerah, salah satunya adalah melalui progrm KB, ditengah kondisi ekonomi dengan keterbatasan pendapatan, masyarakat diharapkan pula dapat menekan biaya (high cost), apalagi bagi keluarga miskin. Semakin besar jumlah anggota keluarga akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran, maka biaya hidup anggota keluarga miskin juga akan bertambah.

Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam mensejahterakan keluarga miskin, berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat Desa menunjukkan bahwa terdapat 65 persen responden mempersepsikan PLKB mempunyai peranan besar dalam mensejahterakan keluarga miskin, sedangkan 10 persen responden mempersepsikan PLKB tidak berperan dalam mensejahterakan keluarga miskin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana untuk mensejahterakan para keluarga miskin sudah cukup baik, upaya PLKB tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada sejumlah anggota keluarga tentang pentingnya program KB dalam membangun keluarga sejahtera.

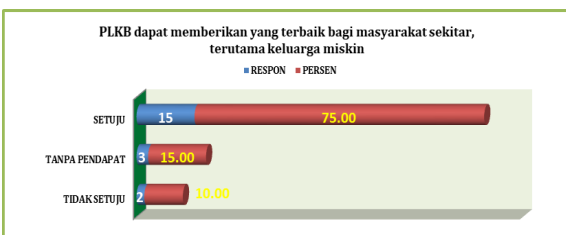


PLKB dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar, terutama keluarga miskin

Sebagai lokomotif pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Donggala PLKB harus senantiasa melaksanakan perannya untuk menekan jumlah keluarga miskin, olehnya PLKB diharapkan dapat memberikan peran yang terbaik bagi masyarakat tempat ia melaksanakan tugas.

Menurut informasi dari para aparat De-

sa yang dijadikan responden dalam kajian ini menunjukkan bahwa terdapat sebesar 75 persen sependapat PLKB dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar, terutama keluarga miskin, sedangkan terdapat 10 persen aparat Desa mempersepsikan PLKB tidak dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun terdapat aparat Desa yang tidak dapat memberikan pendapatnya terkait dengan peran PLKB terhadap masyarakat yaitu sebesar 15 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa walaupun peran PLKB sudah cukup memberikan upaya yang sangat baik dalam membangun keluarga sejahtera, akan tetapi masih sangat diperlukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, hal ini karena masih terdapat persepsi aparat Desa yang masih dianggap belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat. Terutama penyusunan agenda kegiatan yang tepat sasaran dan terpadu dari para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Komunikasi secara umum PLKB dengan masyarakat

Keberhasilan program keluarga berencana akan di capai secara baik dari hasil kinerja tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang diikuti oleh tingkat pemahaman masyarakat sebagai objek sasaran program, ada keterpaduan penyampaian melalui jalinan komunikasi.

Berdasarkan informasi responden secara umum oleh aparat Desa mempersepsikan sebesar 60 persen komunikasi PLKB dengan masyarakat cukup baik, sedangkan sebesar 10 persen dipersepsikan tidak adanya jalinan komunikasi dari pihak PLKB dengan masyarakat. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tingkat komunikasi secara umum dilakukan dengan baik oleh PLKB terhadap masyarakat, olehnya itu, maka upaya ini harus terus dilakukan dan sangat perlu diting-

katkan karena faktor komunikasi merupakan faktor penentu dari tingkat keberhasilan pada pencapaian keikutsertaan masyarakat sebagai objek sasaran program KB, yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Grafik berikut ini.



Upaya mendapat dukungan dari jajaran Kepala Desa demi suksesnya program KB di wilayahnya

Program pemerintah mengenai keluarga berencana akan berjalan terarah dan selaras. Apabila semua pihak ikut bertanggung jawab maupun memberikan dukungan. Salah satu pihak diharapkan turut berperan adalah Kepala Desa.

Berdasarkan informasi ditanggapi oleh para aparat Desa sebesar 80 persen kepala Desa memberikan dukungan terhadap PLKB, sedangkan masih terdapat 10 persen kepala Desa kurang mendukung PLKB. Hasil ini menunjukkan bahwa kepala Desa sebagian besar ikut andil untuk menyampaikan pentingnya keberhasilan program KB kepada masyarakatnya, agar dapat menjalankan program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Donggala melalui sosialisasi dari para tenaga PLKBnya. Sehingga antara kualitas hidup dan standar kesehatan ibu dan anak yang terjamin dapat tercapai dengan baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



PEMBAHASAN

Tugas dan tanggung jawab PLKB di wilayah kerja masing-masing banyak menemukan dinamika yang beragam, dinamika tersebut terkadang menjadi faktor pendorong, namun juga bisa menjadi faktor penghambat. Kondisi wilayah kerja PLKB bisa menjadi kendala apabila tidak didukung oleh sarana dan prasana seperti fasilitas kendaraan agar dapat membantu penyelesaian tugas.

Faktor komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi efektifitas kegiatan, dalam melaksanakan tugasnya, PLKB juga di harapkan dapat melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pencapaian hasil pekerjaan.

Berdasarkan informasi aparat Desa bahwa PLKB dominan sudah memiliki sarana komunikasi untuk mendukung tugasnya dengan persentase sebesar 70 persen, namun masih terdapat beberapa PLKB yang dipersiapkan oleh aparat Desa belum memiliki sarana komunikasi yaitu sebesar 20 persen, hasil ini memberikan gambaran bahwa kondisi PLKB sudah dapat menggunakan fasilitas komunikasi untuk mendukung pencapaian hasil kerja. Namun patut menjadi perhatian penting terkait persepsi PLKB yang belum memaksimalkan komunikasi, sehingga diharapkan ada intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penyediaan sarana komunikasi bagi PLKB sehingga proses dan arus komunikasi bisa berjalan efektif.

Program Keluarga Berencana dari Pemerintah Kabupaten Donggala sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen masyarakat, pihak – pihak lain diharapkan berperan serta untuk saling memberikan dukungannya, peran tanggungjawab PLKB untuk melaksanakan tugas tidak secara mandiri akan berhasil apabila tidak didukung oleh elemen/perangkat Desa diwilayah kerjanya, salah satunya adalah lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Tidak hanya itu tetapi Stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan KB adalah seluruh tenaga medis yang ada diwilayah kerja PLKB, selain puskesmas, dokter, bidan swasta juga sangat diharapkan dapat mendukung seluruh program tersebut.

Keberhasilan program keluarga berencana akan di capai secara baik dari hasil kinerja tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang diikuti oleh tingkat pemahaman masyarakat sebagai objek sasaran program, ada keterpaduan penyampaian melalui jalinan komunikasi.

Kegiatan merupakan bagian dari rentetan program yang dilaksanakan secara terencana melalui sebuah kebijakan, sebagai tenaga penyuluh, PLKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimasyarakat, harus dapat menyesuaikan dengan mekanisme perencanaan yang telah dibuat.

Salah satu tugas dari PLKB adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat pasangan usia subur (PUS) untuk dapat melaksanakan program KB, langkah inilah yang dapat mengantisipasi tingginya tingkat kelahiran di Desa.

Keberhasilan program KB sangat ditentukan oleh kemampuan PLKB memberikan pemahaman yang baik dan dapat dimengerti sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh Lapangan KB dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB sudah tergolong baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PPKBD dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB juga tergolong baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SUB PPKBD dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB juga termasuk kategori baik. Olehnya itu maka artikel merekomendasi perlu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya dalam menerapkan ide-ide yang efektif dan inovatif untuk menarik PUS terlibat dalam program KB. Kemampuan di bidang kepemimpinan menjadi perlu dan penting dimiliki oleh PLKB, karena PLKB adalah pengelola dan "manager" pelaksanaan program KB di tingkat desa. Dengan demikian, mereka harus mampu mengelola dan mengarahkan segala sumberdaya yang ada (manusia, sistem sosial, sarana dan prasarana dan sebagainya) di wilayahnya. Termasuk dalam hal ini adalah memotivasi para Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) yang membantu tugas penyuluhan dan pelayanan KB. Kemampuan lain yang perlu dimiliki dan diper-

hatikan oleh PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD adalah kemampuan profesional selaku penyuluh KB. Hal ini menjadi hal yang urgen, karena tantangan KB dan kependudukan semakin kompleks, sehingga membutuhkan figur penyuluh yang tidak saja menguasai bidang tugasnya, melainkan juga memiliki komitmen dan etos kerja yang kuat dalam menjalani profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluaraga Berencana Nasional Nomor 379/HK-010/F2/2004
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya
- Mangkunegara, Anwar, Prabu, 2007, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga, Bandung, Refika Aditama
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
- Robbins, Stephen P. 1996, Perilaku Organisasi: Edisi Bahasa Indonesia Jilid I dan II, Jakarta, PT Prin Halindo